



SERTIFIKAT

diberikan kepada:

Aisyah Fitri Yuniasih

Atas partisipasinya sebagai **PEMAKALAH**, dalam kegiatan Seminar Nasional Official Statistics 2019 dengan makalah berjudul **DESENTRALISASI FISKAL DAN KETIMPANGAN ANTARKABUPATEN/ KOTA DI SULAWESI SELATAN: IMPLEMENTASI TUJUAN SDG'S KE-10**

24 September 2019, Politeknik Statistika STIS

Direktur POLSTAT STIS

Dr. Erni Tri Astuti, M.Math
NIP. 1967102211990032002

Ketua Panitia SEMNAS 2019

Dr. Ernawati Pasaribu, S.Si, ME
NIP.197310231995122001

DESENTRALISASI FISKAL DAN KETIMPANGAN ANTARKABUPATEN/ KOTA DI SULAWESI SELATAN: IMPLEMENTASI TUJUAN SDG's KE-10

(Fiscal Decentralisation and Inter-district/city Inequality in South Sulawesi: 10th SDG's Goal Implementation)

Irma Korimah¹, Aisyah Fitri Yuniasih²

¹Politeknik Statistika STIS

²Politeknik Statistika STIS

Jl. Otto Iskandardinata No.64C Jakarta Timur 13330

E-mail: ¹15.8671@stis.ac.id, ²aisyah.fy@stis.ac.id

ABSTRAK

Ketimpangan di Sulawesi Selatan yang diukur dari indeks gini relatif terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan SDG's kesepuluh yang diharapkan tercapai di Indonesia pada tahun 2030, meskipun pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan terus mengalami perbaikan. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan desentralisasi fiskal dalam kerangka otonomi daerah untuk mengurangi ketimpangan antardaerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum ketimpangan, desentralisasi fiskal, dana perimbangan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan IPM antarkabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Selain itu, juga menganalisis desentralisasi fiskal serta dana perimbangan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan IPM yang diduga memengaruhi ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan analisis regresi data panel yang mencakup 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama periode 2011-2017. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan negatif menurunkan ketimpangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, dana perimbangan sebagai dana transfer pusat ke daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka justru berpengaruh signifikan dan positif mendorong peningkatan ketimpangan.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, ketimpangan antarkabupaten/kota, regresi data panel

ABSTRACT

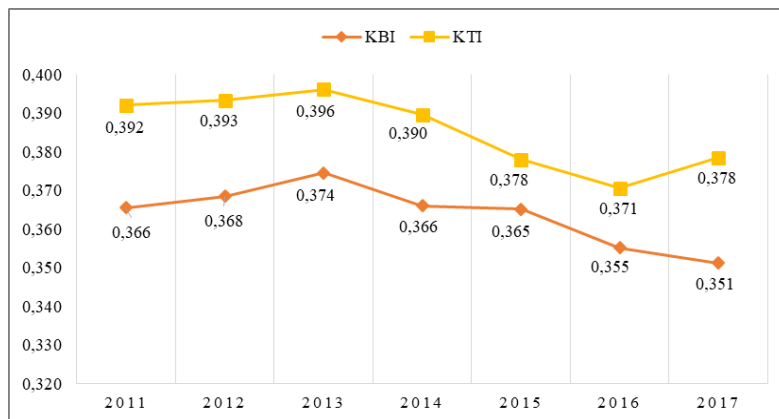
The inequality in South Sulawesi measured from The Gini index ratio is getting higher during these years. It does not go with the purpose of the 10th SDG's which is expected to be managed in 2030 even though its economic development is getting better. As a result, the government manages a fiscal decentralization within regional autonomy framework in order to lessen the interregional inequality. This research is aimed to give general description of the inequality, fiscal decentralization, fiscal balance transfers from the central government to regions, open unemployment rate, and Human Development Index within the inter-district/city in South Sulawesi. It also analyzes fiscal decentralization, fiscal balance transfers from the central government to regions, open unemployment rate, Human Development Index which are considered affecting the inequality of inter-district/city in South Sulawesi by using a method, Regression Models for Panel Data Analysis, which covers 24 districts/cities in South Sulawesi around 2011-2017. The estimation method used in this research is Fixed Effect Model. The results of this research show that the implementation of fiscal decentralization and Human Development Index have negative significant impacts to lower the inter-district/city inequality in South Sulawesi. On the other hand, the fiscal balance transfers from the central government to regions and the open unemployment rate have positive significant impacts in boosting the raising of the inequality.

Keywords: fiscal decentralization, inter-district/city inequality, panel data regression

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi negara berkembang hingga saat ini adalah ketimpangan karena ketidakmerataan pembangunan antardaerah (Afandi, 2018). Permasalahan ketimpangan antarwilayah ini masuk kedalam komitmen dan kebijakan pembangunan oleh pemerintah yang dituangkan dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025 dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 yang menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan Indonesia adalah mewujudkan pembangunan

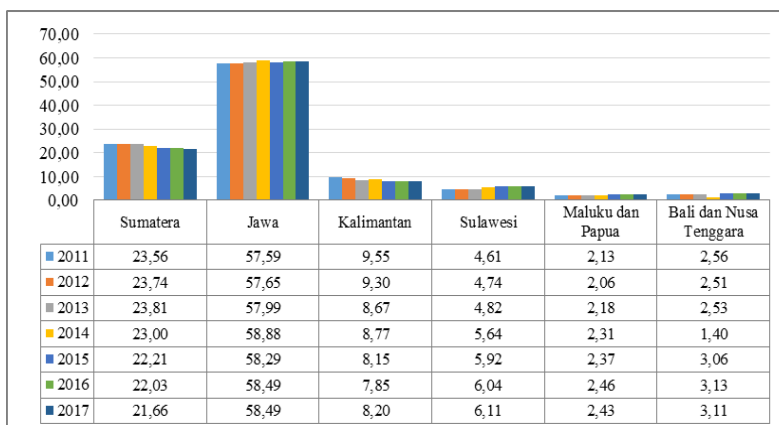
yang merata di seluruh wilayah. Sekarang ini, kondisi ketimpangan yang ada di Indonesia dapat dilihat dari perbandingan antara wilayah Indonesia timur dan Indonesia barat (Tirtosuharto, 2013), wilayah Pulau Jawa dan luar Jawa (Tirtosuharto, 2013), antara provinsi-provinsi di Indonesia (Suwanan dan Sulistiani, 2009), serta pertumbuhan di perkotaan dan perdesaan (Akita dan Pirmansah, 2011).



Gambar 1. Gini rasio Indonesia tahun 2011-2017 (persen)

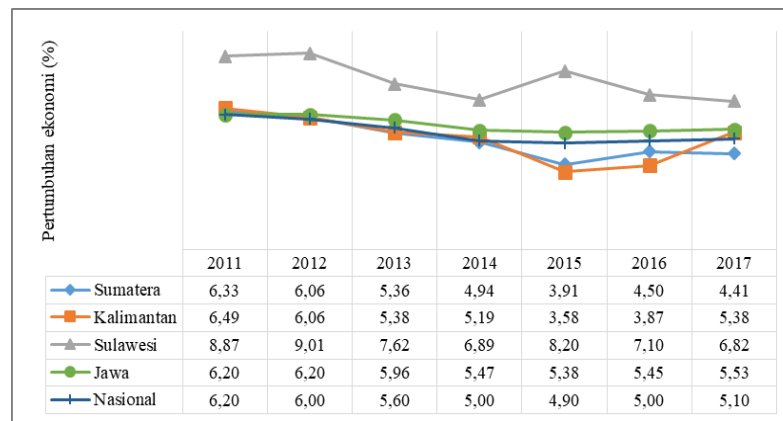
Apabila dibandingkan antara wilayah barat dan wilayah timur, ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (**Gambar 1**). Selama tahun 2011 hingga 2017, rata-rata indeks gini Kawasan Timur Indonesia sebesar 0,385, sedangkan Kawasan Barat Indonesia sebesar 0,364.

Selain itu, kondisi ketimpangan yang terjadi juga tercermin dari besarnya peranan masing-masing pulau terhadap pembentukan PDB Indonesia. Pada **Gambar 2**, terlihat jelas bahwa struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh kelompok Kawasan Barat Indonesia. Dibandingkan Kawasan Timur Indonesia yang besarnya kurang dari 10 persen. Oleh karena itu, Kawasan Timur Indonesia menjadi fokus penting sebagai daerah yang memerlukan perhatian lebih dalam hal ketimpangan antardaerah yang terjadi. Hal ini karena ketimpangan antardaerah yang tinggi memberikan dampak negatif dari segi ekonomi, sosial, dan politik.



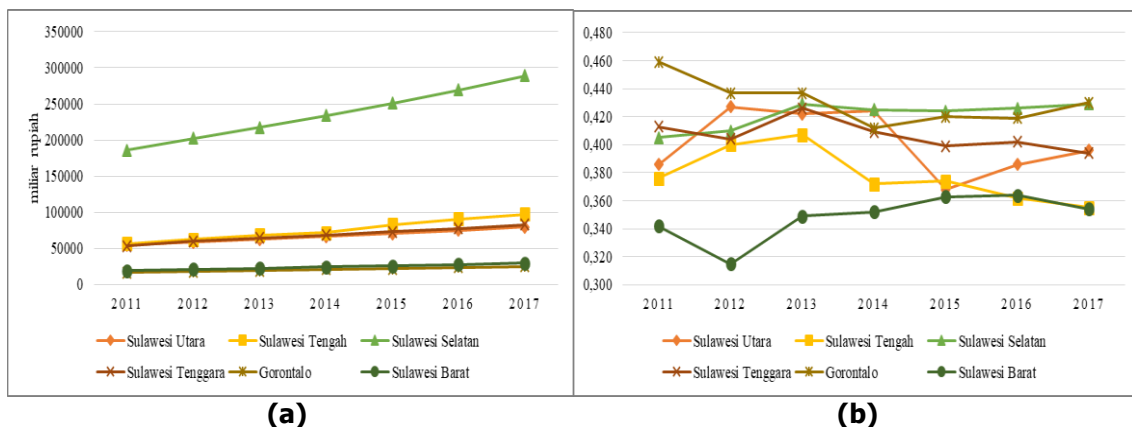
Gambar 2. Peranan pulau dalam pembentukan PDB tahun 2011-2017 (persen)

Selain menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDB dari Kawasan Timur Indonesia (**Gambar 2**), Pulau Sulawesi menjadi yang paling maju dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2011 hingga 2017 dengan rata-rata sebesar 7,78 persen per tahun (**Gambar 3**). Perekonomian Pulau Sulawesi yang baik ini tak lepas dari peran penting Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang kawasan timur yang turut mendukung pencapaian tersebut. Kinerja perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 hingga 2017 dapat dikatakan cukup baik dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,71 persen dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39 persen (BPS, 2017).



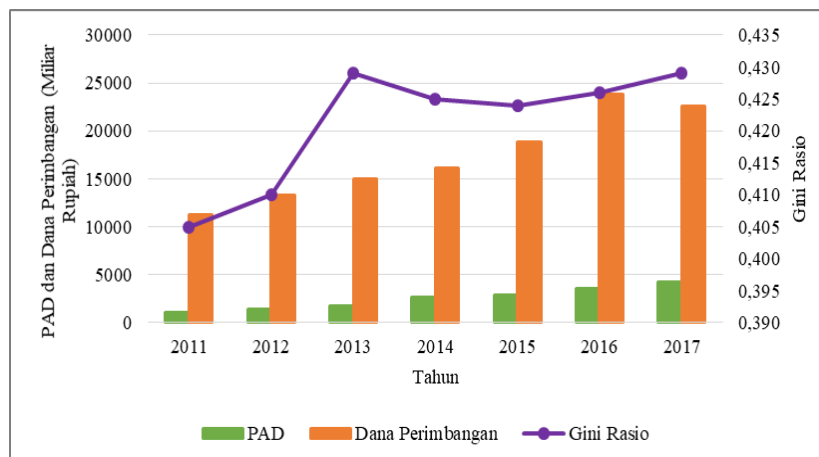
Gambar 3. Rata-rata pertumbuhan ekonomi antarpulau di Indonesia tahun 2011-2017 (persen)

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, nilai output (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan terbesar diantara provinsi-provinsi lain dalam Pulau Sulawesi (**Gambar 4a**).



Gambar 4. Output (PDRB) per provinsi dan gini rasio tiap provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2011-2017

Masalah yang menjadi dasar pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan adalah gini rasio Provinsi Sulawesi Selatan yang cenderung mengalami kenaikan dan menjadi yang tertinggi nilainya selama empat tahun terakhir bila dibandingkan dengan gini rasio provinsi lain di Pulau Sulawesi. Pada tahun 2011, gini rasio di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,405 dan meningkat menjadi 0,429 pada tahun 2017 (**Gambar 4b**). Disisi lain, pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pusat berupa dana perimbangan, secara umum terus mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2011 hingga 2016 (**Gambar 5**). Kondisi ini merupakan sebuah ironi ketika perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan semakin membaik tetapi tidak diikuti dengan penurunan kesenjangan wilayah.



Gambar 5. PAD dan dana perimbangan serta gini rasio Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2017

Lebih lanjut, pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah yang terjadi atau yang dikenal dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Adanya kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap publik dan pembangunan daerah yang lebih merata (Akai dan Sakata, 2002). Selain itu, desentralisasi fiskal juga diharapkan akan meningkatkan efisiensi sumber daya daerah, pembangunan daerah akan lebih cepat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat, dan pada akhirnya mendorong terjadinya pemerataan ekonomi daerah (Oates, 1972; Tiebout, 1956; Ezcurra dan Pascual, 2006).

Berdasarkan latar belakang tersebut, diharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal dapat menurunkan ketimpangan antardaerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah memberikan gambaran umum ketimpangan dan penerimaan pemerintah daerah, desentralisasi fiskal, tingkat pengangguran, dan pembangunan manusia antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, menganalisis pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan yang terjadi di Sulawesi Selatan.

METODOLOGI

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan DJPK Kementerian Keuangan selama periode 2011 hingga 2017. Data-data yang digunakan yaitu realisasi dan anggaran pendapatan dan belanja negara beserta komponen-komponennya, Tingkat Pengangguran Terbuka, jumlah penduduk, dan IPM di tingkat kabupaten/kota. Adapun definisi operasional variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut:

1. Ketimpangan Antarkabupaten/kota yang diukur menggunakan Indeks *Jaime Bonet* atau konsep pendapatan per kapita relatif suatu daerah. Pendapatan per kapita daerah diukur dengan menggunakan rasio PDRB terhadap total penduduk.

$$Disp_{i,t} = \left| \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{p,t}} - 1 \right| \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- $Disp_{i,t}$: ketimpangan antarkabupaten/kota ke-i tahun ke-t;
- $PCGDP_{i,t}$: pendapatan per kapita tingkat kabupaten/kota ke-i tahun ke-t;
- $PCGDP_{p,t}$: total pendapatan per kapita kabupaten/kota.

2. Desentralisasi fiskal yang dihitung dari indikator penerimaan atau rasio antara pendapatan pemerintah daerah setiap kabupaten/kota terhadap pendapatan total pemerintah kabupaten/kota.
3. Dana Perimbangan yaitu dana transfer pusat yang merupakan penjumlahan DAU, DBH pajak, DBH Sumber Daya Alam, dan DAK.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka yang diukur dari persentase antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
5. Indeks Pembangunan Manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu pendidikan, umur yang panjang, dan standar hidup layak.

Metode Analisis

Model estimasi dasar yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model estimasi Lessmann (2006) dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan tujuan dan keterbatasan penelitian terdahulu. Persamaan regresi panel dengan metode *fixed effect* yang terbentuk sebagai berikut:

$$Disp_{i,t} = (\alpha + \mu_i) + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 \ln(DAPER)_{it} + \beta_3 UNEMP_{it} + \beta_4 HDI_{it} + v_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

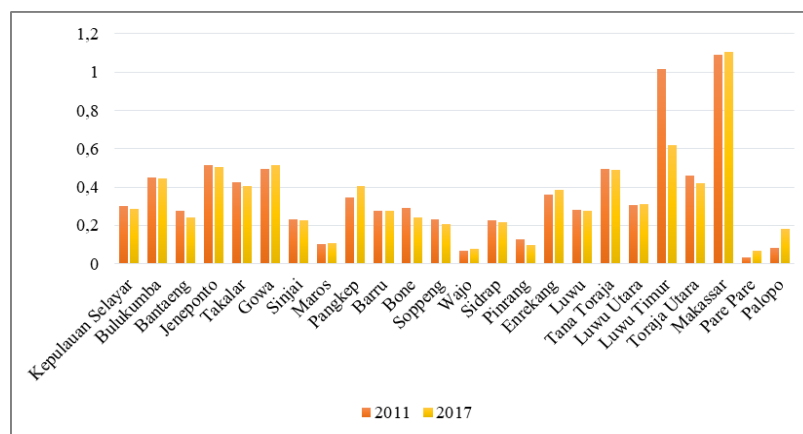
- i : 1,2,...,24, menunjukkan kabupaten/kota;

- t : 1,2,...,7, menunjukkan periode;
 α : koefisien intersep;
 β_k : *slope* dari variabel independen ke-k;
 $Disp_{i,t}$: ketimpangan antarkabupaten/kota;
 $DF_{i,t}$: desentralisasi fiskal (Persen);
 $DAPER_{i,t}$: dana perimbangan (Ribuan Rupiah);
 $UNEMP_{i,t}$: Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen);
 $HDI_{i,t}$: Indeks Pembangunan Manusia;
 μ_i : efek individu acak untuk individu ke-i;
 $v_{i,t}$: *error* dari individu ke-i periode ke-t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Ketimpangan Antarkabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan

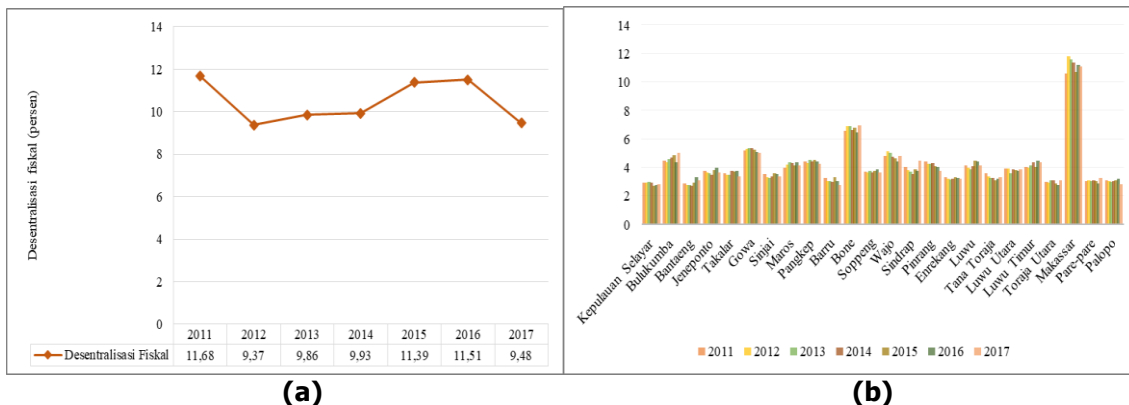
Ketimpangan pembangunan antarwilayah umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini disebabkan adanya keanekaragaman dan perbedaan geografis masing-masing wilayah (World Bank, 2007). Ketimpangan antardaerah disini diukur dari indeks *Jaime Bonet* atau pendapatan per kapita relatif. Sejak tahun 2011 hingga 2017, ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Sulawesi Selatan cenderung tidak banyak mengalami perubahan (**Gambar 6**). Jika dilihat, disatu sisi beberapa daerah mempunyai pendapatan per kapita relatif tinggi, disisi lain masih ada daerah dengan tingkat pendapatan per kapita relatif rendah. Hal ini dilihat dari *range* indeks ketimpangan yang semakin besar antarkabupaten/kota. Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur memiliki kontribusi terbesar terhadap terjadinya ketimpangan dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini karena Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, sedangkan Kabupaten Luwu Timur ditunjang oleh sektor pertambangan dengan hasil utamanya nikel (Aswar, 2018).



Gambar 6. Indeks *Jaime Bonet* setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2011 dan 2017

Gambaran Desentralisasi Fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer ke daerah yang nilainya meningkat setiap tahun. Tujuannya agar pemerintah dapat merencanakan dan mengalokasikan dana untuk berbagai aktivitas kegiatan pembangunan sesuai potensi daerah yang dimiliki dan memilih sektor-sektor unggulan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

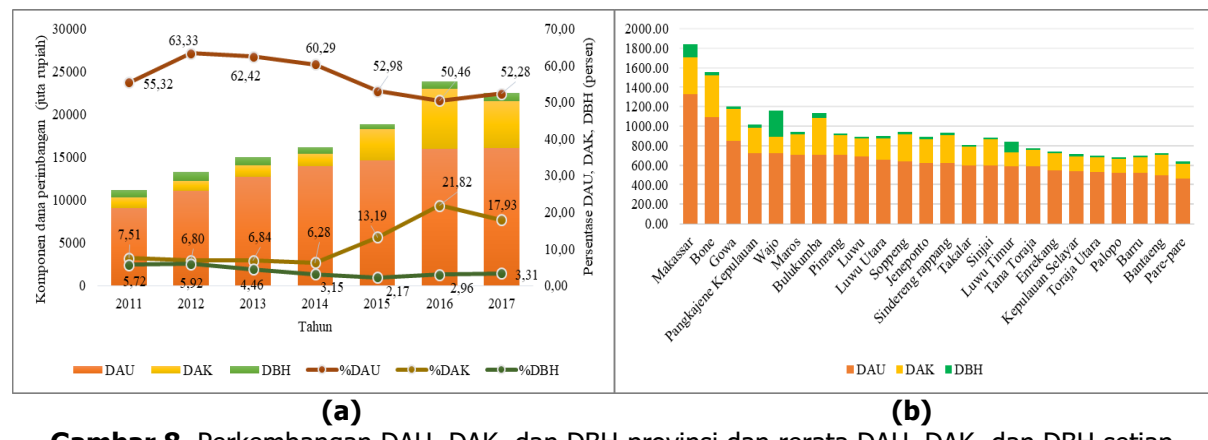


Gambar 7. Desentralisasi fiskal sisi penerimaan Provinsi Sulawesi Selatan dan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2017 (persen)

Secara umum, mulai tahun 2011 sampai 2017, rasio desentralisasi fiskal Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi tetapi nilainya cenderung meningkat (**Gambar 7a**). Peningkatan rasio desentralisasi fiskal ini disebabkan meningkatnya penerimaan negara, sedangkan penurunan rasio desentralisasi fiskal disebabkan menurunnya dana bagi hasil sumberdaya alam yang diperoleh Sulawesi Selatan (BPS, 2017). Sementara itu, bila dilihat dari rasio desentralisasi fiskal kabupaten/kota (**Gambar 7b**), terlihat perbedaan dimana Kota Makassar merupakan daerah dengan rasio desentralisasi fiskal tertinggi sedangkan Kabupaten Barru yang terendah. Hal tersebut dikarenakan penerimaan dari PAD Kota Makassar paling besar daripada kabupaten/kota lain, sedangkan Kabupaten Barru yang terendah (BPS, 2016).

Gambaran Dana Perimbangan di Provinsi Sulawesi Selatan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara umum, besarnya dana perimbangan Provinsi Sulawesi Selatan meningkat pada tahun 2011 hingga tahun 2016, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017 beserta komponen-komponennya (**Gambar 8a**). Peningkatan ini dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur skala nasional di Sulawesi Selatan seperti Makassar New Port, Kereta Api, dan jalan (BI, 2017). Sementara, menurunnya jumlah dana perimbangan pada tahun 2017 karena menurunnya jumlah DAK yang diterima pemerintah Sulawesi Selatan hingga sebesar 20,1 persen (BPS, 2017).

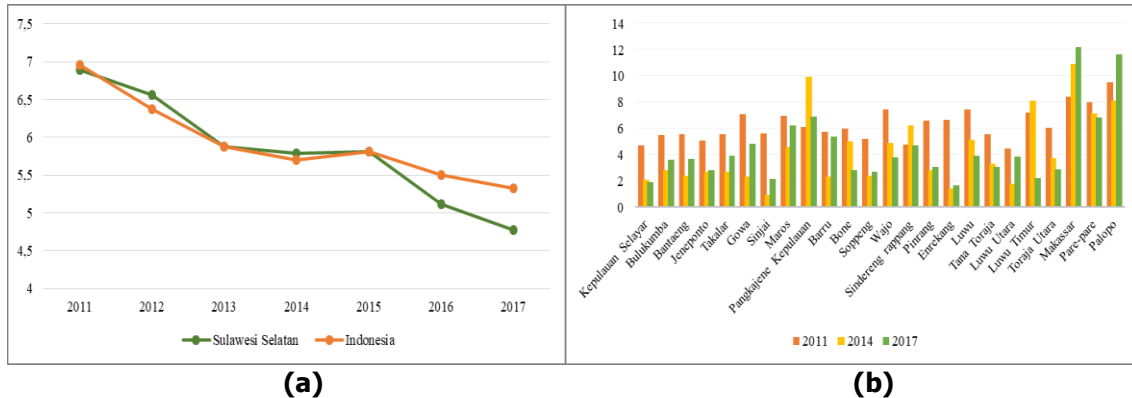


Gambar 8. Perkembangan DAU, DAK, dan DBH provinsi dan rerata DAU, DAK, dan DBH setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2017 (ribu rupiah)

Bila dilihat pada setiap kabupaten/kota, besarnya dana perimbangan didominasi oleh komponen DAU (**Gambar 8b**). Kota Makassar dan Kabupaten Bone memperoleh transfer DAU paling tinggi mencapai Rp1 triliun karena Kota Makassar merupakan pusat Provinsi Sulawesi Selatan dan sedang gencar dalam melakukan pembangunan. Sedangkan, Kota Pare-pare dan

Kabupaten Bantaeng menerima DAU paling rendah yaitu kurang dari Rp500 miliar. Hal ini karena penyerapan atau penggunaan APBD yang telah ditetapkan tahun-tahun sebelumnya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Pare-pare belum maksimal. Sehingga, dampaknya adalah pemotongan DAU pada tahun berikutnya.

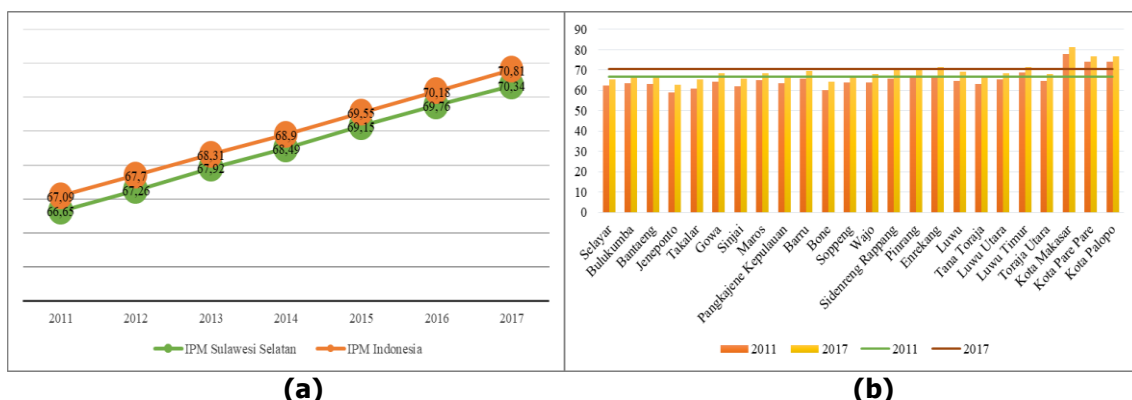
Gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 9. Tren TPT Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2017 dan rata-rata TPT tiap kabupaten/kota tahun Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011, 2014, dan 2017 (persen)

Persentase pengangguran di Sulawesi Selatan selama tahun 2011-2017 berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan (**Gambar 9a**). Meskipun demikian, pada tahun 2012 hingga 2015, tingkat pengangguran Sulawesi Selatan pernah lebih tinggi maupun sama dengan tingkat pengangguran nasional yaitu sebesar 6,56 persen, 5,88 persen, 5,79 persen, dan 5,81 persen. Bila dilihat dari tingkat kabupaten/kota, rata-rata TPT kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan turun menjadi 4,44 persen pada tahun 2017 dari tahun 2011 (**Gambar 9b**). Namun, masih ada lima dari 24 kabupaten/kota yang memiliki tingkat pengangguran diatas tingkat pengangguran nasional. Daerah tersebut diantaranya adalah Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kota Makassar, Kota Pare-Pare, dan Kota Palopo. Daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah Kota Makassar. Hal tersebut disebabkan karena dominasi masyarakat yang lebih memilih bekerja di perkotaan dibanding pedesaan dimana perbandingannya 8,38 persen di perkotaan dan 3,16 persen di pedesaan. Sedangkan, daerah dengan tingkat pengangguran terendah adalah Kabupaten Enrekang sebesar 1,66 persen.

Gambaran Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 10. Tren rata-rata IPM kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2017 (persen) dan IPM per kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 dan 2017

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan selama tahun 2011 hingga 2017 tetapi nilainya masih berada di bawah IPM Indonesia (**Gambar 10a**). Walaupun demikian, status pembangunan manusia Sulawesi Selatan masuk pada kelompok tinggi pada tahun 2017. Jika dilihat per kabupaten/kota (**Gambar 10b**), pada tahun 2011, ada sebanyak enam daerah dengan rata-rata nilai IPM lebih besar dari rata-rata IPM

Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Pare-pare, dan Kota Palopo. Sedangkan pada tahun 2017, hanya lima daerah yang mempunyai IPM diatas IPM Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Timur, Kota Pare-pare, Kota Palopo, dan Kota Makassar. Daerah-daerah dengan IPM diatas rata-rata tersebut merupakan daerah Sulawesi Selatan bagian utara, hal ini mencerminkan bahwa pembangunan manusia di Sulawesi Selatan masih terkonsentrasi di bagian utara, sedangkan bagian selatan Sulawesi Selatan belum optimal (Wajdi, 2011).

Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Antarkabupaten/kota di Sulawesi Selatan

Identifikasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan antarkabupaten dilakukan dengan regresi data panel. Model yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model*. Sebelum itu, telah dilakukan pengujian untuk mendapatkan model terbaik yaitu dengan melakukan uji *Chow* dan uji *Hausman*. Oleh karena model yang didapat adalah *fixed effect*, maka perlu dilakukan uji LM dan *λLM* yang menghasilkan kesimpulan bahwa matriks struktur varians-kovarians residual bersifat heteroskedastik dan terdapat korelasi antarindividu. Oleh karena itu, metode estimasi yang digunakan adalah *Seemingly Unrelated Regression (SUR)*, sehingga model terbaik yang diperoleh adalah *Fixed Effect Model* dengan *cross-section weight* dan *coefficient covariance method cross section SUR/Feasible Generalized Least Square (FGLS)*. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik. Berdasarkan model dan metode yang diperoleh, uji asumsi klasik yang perlu dilakukan adalah uji normalitas dan nonmultikoleniaritas karena FGLS telah mengakomodasi masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas (Greene, 2003). Pada pengujian normalitas menggunakan uji *Jarque-Bera* disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal dan pada uji nonmultikoleniaritas disimpulkan bahwa model yang ada tidak memiliki masalah kolinearitas antarvariabel bebas karena nilai VIF yang diperoleh tidak lebih dari 10 (Gujarati, 2005).

Ringkasan model yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan output *Fixed Effect Model* dengan metode SUR

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien	t-statistik	Peluang
Ketimpangan Antarkabupaten/kota	Konstanta	0,4707	10,6437	0,0000
	DF	-0,0060	-2,0483	0,0424
	Ln(DAPER)	0,0100	2,4599	0,0151
	UNEMP	0,0024	3,5887	0,0005
	HDI	-0,0046	-3,9761	0,0001
Ringkasan Statistik				
<i>Adjusted R-Squared</i>			0,9967	
F-Statistik			1877,769	
<i>Prob(F-Stat)</i>			0,0000	

Sumber: Hasil pengolahan.

Persamaan yang diperoleh sebagai berikut:

$$\hat{Disp}_{i,t} = (0,4707 + \mu_i)^{***} - 0,006DF_{it}^{**} + 0,0100\ln(DAPER)_{it}^{**} + 0,0024UNEMP_{it}^{***} - 0,0046HDI_{it}^{***} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan: ***) signifikan pada alfa 1%, **) signifikan pada alfa 5%

Tabel 1 menunjukkan ringkasan hasil estimasi dimana nilai F-statistik sebesar 1977,769 atau *p-value* kurang dari 0,05 yang berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel ketimpangan antarkabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Kemudian, bila dilihat dari uji parsial disimpulkan bahwa tiap variabel independen berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen terhadap ketimpangan antarkabupaten/kota.

Pada *Fixed Effect Model*, setiap kabupaten/kota menunjukkan efek individu atau perilaku yang berbeda. Perilaku ini merupakan nilai yang menunjukkan besarnya ketimpangan antarwilayah yang terjadi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dari nilai intersep yang berbeda-beda. Kota Makassar memiliki nilai koefisien terbesar (0,828) kemudian Kabupaten Luwu Timur (0,506). Hal ini berarti setiap peningkatan penerimaan di Kota Makassar

dan Kabupaten Luwu Timur cenderung memperlebar ketimpangan antarkabupaten/kota dengan asumsi variabel lain tetap. Kabupaten/kota yang berpotensi besar menurunkan ketimpangan adalah Kabupaten Wajo (-0,280) dan Kota Pare-pare (-0,271). Apabila dilakukan peningkatan penerimaan di Kabupaten Wajo dan Kota Pare-pare, maka akan memberikan pengaruh yang kuat untuk menurunkan ketimpangan dibandingkan kabupaten/kota lain.

Hasil estimasi pada **Tabel 1** menunjukkan bahwa adanya desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan negatif mengurangi ketimpangan antarwilayah di Sulawesi Selatan. Setiap terjadi kenaikan 1 persen rasio desentralisasi fiskal akan menyebabkan penurunan ketimpangan antarkabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebesar 0,006 dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian Lessman (2006), Irawan (2014), dan Bartolini and Blöchliger (2016) yang menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif menurunkan ketimpangan antardaerah. Menurut teori Kuznets, ketimpangan yang terjadi akan berkurang seiring berjalannya pembangunan ekonomi (Todaro, 2003). Adanya desentralisasi fiskal membuat penerimaan pemerintah daerah meningkat dan meningkatkan PDRB per kapita daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi tersebut diperkuat dengan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur dengan IPM dan hasilnya berpengaruh signifikan dan negatif mengurangi ketimpangan antarkabupaten/kota. Setiap terjadi kenaikan 1 satuan IPM, maka ketimpangan antardaerah berkurang sebesar 0,0046 dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arham (2014) dan Syamsir dan Rahman (2018) bahwa semakin baik IPM suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketimpangan daerah tersebut terhadap daerah lain. Berdasarkan teori *human capital*, tingkat kesejahteraan seseorang yang diukur dari peningkatan penghasilan dapat ditingkatkan melalui pendidikan (Todaro, 2003). Apabila tingkat penghasilan seseorang meningkat, kebutuhan yang sebelumnya belum terpenuhi dapat terpenuhi karena adanya tambahan pendapatan.

Apabila dilihat dari variabel transfer pusat ke daerah yang diproksi dari dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya, setiap terjadi kenaikan 1 persen dana perimbangan akan meningkatkan ketimpangan antarkabupaten/kota sebesar 0,0001 dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2012) bahwa dana bagi hasil yang merupakan komponen dana perimbangan berpengaruh positif meningkatkan ketimpangan pendapatan antardaerah.

Secara teori, seharusnya dengan adanya transfer dari pemerintah pusat ke daerah dapat mengurangi perbedaan pendapatan daerah satu dengan yang lainnya. Sehingga, kesenjangan antardaerah dapat berkurang. Namun, hal tersebut belum dapat tercapai. Ada tiga hal yang menyebabkan transfer pusat ke daerah belum mencapai tujuannya. *Pertama*, formulasi penghitungan DAU belum menunjukkan perannya sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan daerah. *Kedua*, peningkatan transfer pusat berupa dana perimbangan, utamanya DAU yang sangat besar menyebabkan ketergantungan keuangan daerah. *Ketiga*, dilihat dari realisasi pelaksanaan kegiatan pemerintah belum menunjukkan pengelolaan kinerja keuangan yang efisien, walaupun realisasi besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah dari target yang direncanakan sebelumnya telah dimanfaatkan pemerintah secara optimal.

Disisi lain, variabel ketimpangan yang meningkat seiring dengan penambahan dana transfer pusat ke daerah diperkuat dengan faktor tingkat pengangguran terbuka yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan yang terjadi antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga, setiap terjadi kenaikan 1 persen jumlah orang yang menganggur, maka akan meningkatkan ketimpangan antarkabupaten/kota sebesar 0,0024 dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Lesmann (2006) dan Samsir dan Rahman (2018), bahwa tingkat pengangguran yang tinggi berdampak terhadap ketidakseimbangan regional yang lebih tinggi. Penjelasan terkait teori yang digunakan yaitu dalam penghitungan pendapatan nasional menurut metode pendapatan, salah satunya terdiri atas komponen upah. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah semakin kecil. Sehingga, nilai pendapatan nasional kecil yang berarti nilai pendapatan per kapita juga turun. Nilai pendapatan per kapita penduduk yang kecil, mengakibatkan kesenjangan semakin melebar.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis yaitu kondisi ketimpangan yang terjadi antarkabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2011 hingga 2017 cenderung tidak banyak mengalami perubahan. Padahal, dana desentralisasi fiskal disalurkan ke setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tersebut mengalami peningkatan setiap tahun. Selama tahun 2011 hingga 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan berfluktuatif, tetapi cenderung mengalami penurunan. Sementara itu, variabel IPM selama periode penelitian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun demikian, kenaikan IPM di Sulawesi Selatan masih dibawah IPM nasional. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan pada tahun 2011 hingga 2017 berpengaruh signifikan dan negatif mengurangi ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya, pemerintah berhasil dalam mengelola anggaran daerahnya sehingga lebih efisien khususnya pada sektor publik. Sedangkan, faktor transfer pusat ke daerah berupa dana perimbangan justru berdampak meningkatkan ketimpangan antarkabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, Nobuo, & Sakata, Masayo. (2002). Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data for the United States. *Journal of Urban Economics*, 93-108.
- Akita, Takahiro, & Pirmansah, Alit. (2011). Urban Inequality in Indonesia. *Journal Economics & Management Series*.
- Arham, M. A. (2014). Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 145-167.
- Aswar. (2018). *Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan 2002-2016* [TESIS]. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Baransano, et. al. (2016). Analysis of Factors Affecting Regional Development Disparity in the Province of West Papua. *Journal of Economics and Development Studies*, Vol.4, No.2, 115-128.
- Bartolini, D., S. Stossberg and H. Blöchliger. (2016). Fiscal Decentralization and Regional Disparities. *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1330. OECD Publishing, Paris.
- Besley, Timothy, & Ghatak, Maitreesh. (2003). Incentives, Choice, and Accountability in the Provision of Public Services. *Oxford Review of Economic Policy*, Vol.19, No.2, 235-249.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2014-2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2015-2016 (Buku 2). Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2017). Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan: Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- Dyah, Savitri M. (2012). The Impact of Fiscal Decentralization on Income Inequality in Indonesia. *The Okuma School of Public Management, Waseda University*.
- Ezcurra, Roberto, & Pascual, Pedro (2006). Fiscal Decentralization and Regional Disparities: Evidence From Several European Union Countries. *Environment and Planning A 2008*, 1185-1201.
- Greene, W., H. (2003). *Econometric Analysis*. New York: Prentice Hall.
- Gujarati, D. (2003). *Basic Econometrics*. Singapore: McGraw Hill Higher Education.
- Irawan, Andi. (2014). *Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralization* [DISERTASI]. Urbana-Champaign: University of Illinois.
- Lessmann, Christian. (2006). Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries. *Ifo Institute for Economic Research at the University of Munich*.
- Samsir, Andi, & Rahman, Abdul. 2018. Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. *Journal Economics, Social and Development Studies*, 22-42.
- Suwanan, A.F., & Sulistiani, E.H. (2009). Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia: a Dynamic Panel Data Evidence. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 328-336.
- Tirtosuharto, Darius. (2013). Regional Inequality in Indonesia: Did Convergence Occur Following the 1997 Financial Crisis?. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Wajdi, Filzah. (2011). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan* [TESIS]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- World Bank. (2005). *Introduction to Poverty Analysis*. -: World Bank Institute.
- Yin, Zhang, & Bin, Zhang. (2014). Human Development Status and Regional Disparity in China. *Chinese Journal of Urban and Environmental Studies*, Vol.2, No.2.